**BAB XV**

**PEMBIAYAAN PENDIDIKAN**

1. **Pengertian**

Manusia dalam kehidupan dan penghidupannya tidak dapat melepaskan diri dari pembiayaan. Sejak lahir sampai menjelang mati, manusia membutuhkan biaya. Manusia minimal membutuhkan biayai makan, minum, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan rekreasi. Tetapi yang paling penting dari semua itu adalah biaya untuk berbuat kebaikan bagi umat manusia.

Dalam manajemen, hampir semua kegiatan baru dapat dilakukan (*do it*) jika ada duitnya. Dalam dunia bisnis berlaku hukum, ada rupa ada harga. Dalam dunia pendidikan diasumsikan bahwa pembiayaan pendidikan mempengaruhi mutu proses dan hasil belajar siswa. Penelitian Salis (2008) menyimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara mutu biaya dengan mutu pendidikan.

Pendidikan sangat erat kaitannya dengan uang karena pendidikan memerlukan biaya (*cost*). Kaitan uang dengan pendidikan dapat dipelajari melalui tiga komponen dan subkomponen seperti tabel berikut.

**Tabel XV. 1 Tiga Komponen dalam Mempelajari Hubungan Uang dengan Pendidikan**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Ekonomi Pendidikan (fungsi alokasi)** 2. **Pendanaan (*Financing*) pendidikan (fungsi distribusi)** 3. **Administrasi bisnis sekolah (fungsi manajemen)** | 1. Pengembangan konsep modal manusia 2. Tingkat kembalian modal investasi (*Rates of return to investment*). 3. Analisis Biaya-manfaat (*Cost-benefit Analysis*) 4. Analisis Biaya-Efektivitas (*Cost-effectiveness Analyisis*) 5. Perencanaan ketenagakerjaan (*Manpower planning*). 6. Peningkatan pemasukan (*Revenue raising*). 7. Perencanaan pengeluaran (*Expenditure planning*) 8. Pertimbangan keadilan: siswa, wajib pajak, geografi, guru, dan program sekolah. 9. Penganggaran (*budgeting*) 10. Pembukuan (*accounting*) 11. Pemeriksaan (*auditing*) |

(Jones, 1985: 26)

Pembiayaan (*costing*) pendidikan menurut Levin (1987) adalah proses pengalokasian sumber dana terbatas untuk melaksanakan pendidikan antar jalur, jenis, maupun jenjang pendidkan; baik pusat maupun daerah; baik negeri maupun swasta; baik input, proses, maupun output pendidikan.Pembiayaanpendidikan adalah jumlah rupiah yang dialokasikan untuk melaksanakan pendidikan.

Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu fungsi manajemen ekonomi pendidikan (Jones, 1995) dan fungsi manajemen seperti pendapat Gullick & Urwick (1937), *American Association of School Administration* (1955), Kotter (2005), Gorton, et al. (2007), dan Sharma (2009) seperti yang tercantum di Bab I. Pembiayaan pendidikan berkaitan dengan politik pendidikan, program pembiayaan pemerintah, dan manajemen keuangan sekolah. Dalam pembiayaan pendidikan tidak ada pendekatan tunggal yang terbaik untuk pembiayaan semua sekolah karena kondisi tiap sekolah berbeda-beda.

Setiap kebijakan pembiayaan pendidikan mempengaruhi sumber dana yang diperoleh dan sumber dana yang dialokasikan. Sumber dana yang diperoleh berkenaan dengan pendapatan, sedangkan sumber dana yang dialokasikan berkenaan dengan belanja. Dengan menerapkan kebijakan yang berbeda-beda membawa akibat terhadap keputusan yang berdampak pada pembiayaan pendidikan yaitu: (1) siapa yang akan dididik dan seberapa banyak jasa pendidikan dapat disediakan?; (2) bagaimana mereka akan dididik?; (3) siapa yang akan membayar biaya pendidikan?; (4) sistem pemerintahan seperti apa yang paling sesuai untuk mendukung pembiayaan sekolah? Pembiayaan sekolah harus mengacu pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku agar pengelola pembiayaan pendidikan tidak terkena sanksi hukum.

1. **Dasar Hukum**

Dasar hukum yang erat hubungannya dengan dengan pembiayaan pendidikan antara lain yaitu: (1) UUD 1945; (2) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (3) PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; (4) PP No. 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan; (5) Permendiknas No 69 tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (PP SNP) Pasal 62 disebutkan:

1. Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.
2. Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap.
3. Biaya personal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
4. Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:
   1. Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji.
   2. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan
   3. Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.
5. Standar biaya operasi satuan pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP.

Peraturan lainnya yang erat kaitannya dengan pembiayaan pendidikan adalah: PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan, Permendikbud Nomor 60 Tahun 2011 tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, dan Permendikbud Nomor 161 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2015.

**C. Tujuan dan Manfaat**

Tujuan pembiayaan pendidikan yaitu: (1) terlaksananya fungsi manajemen, *budgeting* menurut para ahli seperti pada Bab I, (2) terselenggaranya pendidikan dengan lancar; (3) terlaksananya peningkatan mutu proses dan hasil belajar siswa. Manfaat pembiayaan pendidikan yaitu: (1) memenuhi kebutuhan sekolah; (2) memenuhi standar pendidikan; (3) meningkatnya mutu proses dan hasil belajar siswa.

**D. Prinsip**

Pembiayaan pendidikan dilakukan berdasarkan prinsip: (1) legal, (2) manfaat, (3) efektif, (5) efisien, (6) adil, (7) transparansi, (8) akuntabilitas, (8) plafon, (9) mata anggaran, (10) tidak langsung, (11) prioritas, (12) terpadu, dan (13) desentralisasi. Keadilan artinya berimbang berdasarkan kinerja dan kegiatan. Efektif artinya sesuai dengan peruntukkan dan tujuannya. Efisien artinya penghematan. Transparansi artinya terbuka untuk dikatahui pihak terkait. Akuntabilitas publik artinya dapat dipertanggungjawabkan di depan publik. Plafond artinya rencana anggaran sesuai dengan alokasi yang sudah ditetapkan penyandang dana. Mata anggaran artinya pengeluaran tidak boleh keluar dari Mata Anggaran Kegiatan (MAK) yang berlaku. Tidak langsung artinya dana yang diterima disetorkan dulu ke bendahara kemudian dikeluarkan bendahara sesuai dengan permintaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Prioritas artinya anggaran mengutamakan yang sangat penting dan sangat mendesak saja. Terpadu artinya anggaran tidak ada yang tumpang tindih atau *double accounting.* Desentralisasi artinya rencana anggaran disusun secara otonomi oleh masing-masing unit kerja.

1. **Pengembangan Konsep Modal Manusia**

Pemerintah atau perorangan yang telah membiayai pendidikan untuk warganya atau dirinya dan atau keluarganya disebut *human investment* atau modal manusia. Konsep pengembangan konsep modal manusia digambarkan sebagai berikut.

**Gambar XV.1 Pengembangan Konsep Modal Manusia**

1. **Analisis *Cost-Benefit* (*Rates of Return to Investment*)**

Lihat Bab IV Subbab Pendekatan Perencanaan Pendidikan

1. **Analisis *Cost-Effectiveness***

Lihat Bab IV Subbab Pendekatan Perencanaan Pendidikan

1. **Perencanaan Tenaga Kerja**

Perencanaan tenaga kerja adalah mempelajari permintaan tenaga kerja *(demand)*, persediaan tenaga kerja *(supply)* yang dihasilkan dunia pendidikan*,* pasar kerja (pertemuan lowongan kerja dan pencari kerja), dan alternatif penyelesaian kesenjangan antara permintaan dan persediaan tenaga kerja. Tujuan perencanaan tenaga kerja yaitu tersedianya lapangan kerja lulusan yang sesuai dengan bidang keahliannya; terkuranginya pengangguran terdidik; cepatnya kembali modal yang telah diinvestasikan di bidang pendidikan.

Peminta tenaga kerja yaitu dunia kerja baik yang bersifat profit maupun nonprofit. Penyedia tenaga kerja yaitu institusi pendidikan dan pelatihan. Tenaga kerja adalah angkatan kerja dan nonangkatan kerja. Angkatan kerja *(labor force)* adalah mereka yang bekerja dan mereka yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan, sedang non-angkatan kerja adalah mereka yang bersekolah, mengurus rumah tangga, dan menerima santunan. Tingkat pengganguran adalah rasio antara jumlah penganggur dibagi jumlah angatan kerja dikali 100%. Jika persediaan tenaga kerja lebih besar daripada permintaan tenaga kerja, maka terjadilah pengangguran. Jika persediaan tenaga kerja lebih kecil daripada permintaan tenaga kerja, maka terjadilah kekurangan tenaga kerja. Kekurangan tenaga kerja terjadi karena: (1) ada lapangan kerja baru; (2) berkembangnya dunia kerja; (3) ada tenaga kerja yang berhenti; (4) ada tenaga kerja yang meninggal dunia. Pemberhentian tenaga kerja karena pensiun, minta berhenti, sakit kronis, dan mendapat sanksi hukum.

Penyebab terjadinya pengangguran terdidik antara lain: (1) jumlah persediaan melampaui permintaan tenaga kerja (defisien); (2) kompetensi lulusan tidak sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja atau kompetensi yang diajarkan atau keterampilan lulusan sudah usang (struktural); (3) menunggu ingin ganti pekerjaan (*friction* atau masa transisi); kehilangan pekerjaan karena musim kerja (Misalnya musim tanam, panen, proyek) sudah berakhir (siklik); (4) pemalas. Cara mengatasi penyebab tersebut antara lain: (1) menghitung proyeksi kebutuhan tenaga kerja secara akurat dengan melibatkan pihak terkait; (2) memperbaharui proyeksi tersebut secara berkala dengan melibatkan pihak terkait; (3) meningkatkan koordinasi terkait dengan dunia pendidikan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja tersebut; (4) dunia pendidikan hanya membuka program studi yang lulusan sudah pasti terserap dunia kerja; (5) meningkatkan relevansi pendidikan dengan dunia kerja; (6) menyiapkan lulusan yang bermutu tinggi; (7) pemerintah melaksanakan proyek yang padat karya.

1. **Jenis Pembiayaa Pendidikan**

Biaya pendidikan ada secara garis besarnya ada empat jenis: (1) biaya langsung (*direct costs*), (2) biaya tidak langsung (*indirect costs*), (3) biaya moneter (*monetary costs*), (4) biaya nonmoneter (*nonmonetary costs*), (5) biaya rata-rata (*unit cost*), (6) biaya marginal (*marginal cost*), dan (7) biaya keseluruhan (*total cost*).

**Biaya langsung** adalah biaya yang langsung berkenaan dengan proses pendidikan, misalnya gaji guru dan pegawai, pengadaan fasilitas belajar (ruang tingkat, kantor, WC, sarana ibadah, gudang, laboratorium), ATK, buku rujukan pengajar dan buku pegangan siswa. Biaya langsung meliputi: biaya investasi dan biaya operasi. Biaya investasi disebut juga sebagai biaya kapital (*capital costs*), *capital expenditure, development costs,* biaya modal. Biaya operasi disebut juga sebagai biaya lancar (*recurrent costs*), *operational costs,*  *recurrent expenditure,* atau biaya rutin.

**Biaya tidak langsung** adalah biaya yang dikeluarkan oleh siswa, orang tua/masyarakat untuk menunjang keperluan yang tidak langsung, seperti: biaya hidup, pakaian, kesehatan, gizi, transportasi, pemondokan, dan *forgone earning* (*forgone costs*)selama pendidikan. *Forgone earning* atau *opportunity cost* adalah kehilangan mendapatkan penghasilan karena ia sedang mengikuti pendidikan.

**Biaya moneter** adalah biaya langsung, biaya tidak langsung, biaya pribadi (*private costs*), atau biaya sosial (*social costs*). **Biaya pribadi** adalah biaya yang dikeluarkan oleh keluarga untuk membiayai sekolah anaknya, di dalamnya termasuk *forgone earning* misalnya uang sekolah, buku, peralatan.

**Biaya nonmoneter** adalah biaya nonuang seperti peserta didik tidak sempat bermaian karena harus sekolah atau membantu orang tua dan biaya sosial (*social cost*). **Biaya sosial** (*cyrle cost*) adalah biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk membiayai sekolah, termasuk di dalamnya biaya pribadi. Biaya sosial adalah adalah kerugian sosial yang ditanggung masyarakat akibat dari investasi pendidikan, misalnya pengangguran terdidik.

**Biaya rata-rata** adalah biaya total pendidikan (*total costs of education*) dibagi jumlah siswa yang terdaftar. *Unit cost* meliputi: *unit cost* pembelajaran teori, *unit cost* pembelajaran praktik, *unit cost* per siswa, *unit cost* per mata pelajaran, *unit cost* per kelas, dan *unit cost* per sekolah. **Biaya marginal** adalah biaya total pendidikan dibagi jumlah siswa yang lulus.

**Biaya keseluruhan** adalah biaya keseluruhan (Rp) per sekolah per tahun, pada jenjang tertentu. Cara menghitungnya gunakan rumus TC pada halaman ….

1. **Penganggaran**

Penganggaran adalah penyusunan anggaran uang yang akan dibelanjakan untuk membiayai kegiatan dalam kurun waktu tertentu. Penganggaran sekolah menurut Poston, 2011: 5), “*School budgeting is a part of prediction, communication, planing, and decision making.”* Dalam merencanakan anggaran tentukan kegiatannya lebih dulu baru dihitung anggarannya. Agregat biaya seperti gambar berikut.

**Agregat Biaya untuk Perlengkapan Pendidikan**

Biaya instruksional Biaya tambahan

Langsung Tidak langsung Umum Fisik

1.Gaji guru 1. Perlengkapan mengajar 1. Operasi

2.Gaji nonguru 2.Pembantu Perawatan

3.Gaji Pembina, Layanan & Perbaikan

Konsultan Pendukung Administrasi

1.Audio visual, per- 1. Staf lokal

Pustakaan 2. Staf pusat

2.Pendidikan khusus 3. Pengadaan dan

3.Panduan Layanan perlengkapan

Psikologik 4. Kesejahteraan

4.Layanan makanan

5.Transfortasi

6.Gaji guru penganti

**Gambar XV.2** **Agregat Biaya untuk Perlengkapan Pendidikan (Cunningham & Cordeiro, 2009: 366)**

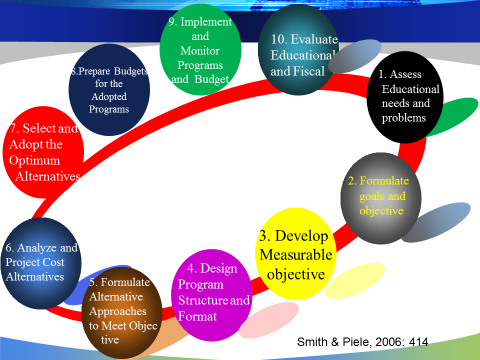
1. **Sumber Pemasukan dan Pengeluaran Dana**

Sumber pemasukan dana *(Revenue)*pendidikan berasal dari dana APBN, APBD, dan sumbangan masyarakat yang tidak mengikat, dan dari dana hibah. Pengeluaran dana *(Expenditure)*digunakan untuk biaya: investasi, operasi, personal. Ketiga biaya tersebut disebut **kategori anggaran.**

**L. Metode Anggaran**

Metode anggaran meliputi: (1) *line-item budgeting,* (2)  *program-base budgeting*, (3) *site-based budgeting,* (4) *Zero-Based Budgeting* (ZBB), (5) *Performance-Based Budgeting* (PBB), (6) *Planning Programming Budgeting System* (PPBS), (7) *Planning Programming Budgeting Evaluating System* (PPBES), dan (7). *Line-item budgeting* atau *traditional budgeting* atau *incremental budgeting* adalah item penganggaran tahun ini digunakan tahun berikutnya dengan menambah prediksi inflasi pada tahun dana yang akan dibelanjakan. Item dikelompokkan dalam bentuk MAK.

*Program-base budgeting* adalah penganggaran yang disediakan untuk mencapai tujuan program berdasarkan prediksi kepala sekolah. *Site-based budgeting* adalah penganggaran berbasisi kebutuhan sekolah. *Zero-Based budgeting* adalah penganggaran berbasis nol yang direncanakan tanpa mengacu anggaran tahun sebelumnya. Langkah-langkah: (1) Mengidentifikasi keputusan unti (tetapkan program yang menggunakan uang); (2) Menganalisis keputusan paket (dokumen yang menggambarkan keputusan objektif, kegiatan, dan biaya); (3) Urutkan paket keputusan; (4) alokasikan dana; (5) siapkan anggarannya (Cuningham & Cordeiro, 2009:369). *Performance-Based Budgeting* adalah penganggaran berbasis kinerja. *Planning Programming Budgeting Evaluating System* adalah sistem perencanaan, pemograman, penganggaran, dan pengevaluasian; sebagai revisi dari PPBS . Langkah-langkahnya digambarkan seperti berikut.

****

**Gambar XV.3 Sepuluh Langkah PPBES**

**M. Peranan Kepala Sekolah dalam Penganggaran**

Peranan kepala sekolah dalam penganggaran adalah sebagai: (1) perencana, (2) penganalisis, (3) pemohon, (4) dan pengontrol. Perencana artinya kepala sekolah menyusun RAPBS setiap akhir tahun anggaran. Penganalisis artinya kepala sekolah menganalisis apakah anggaran sudah sesuai atura, prinsip, prioritas, standar pembiayaan? Pemohon artinya kepala sekolah mengajukan RAPBS-nya ke Dinas Pendidikan setempat agar dapat disetujui. Pengontrol artinya kepala sekolah mengawasi masuk dan keluarnya uang di sekolahnya.

1. **Proses Penganggaran**

Proses pengganggaran digambarkan sebagai berikut.

**Gambar XV.4 Proses Penganggaran (Lunenburg & Orstein, 2011: 360)**

1. **Pembukuan**

Pembukuan (*accounting*) adalah pengurusan keuangan yang menyangkut kewenangan dalam menentukan kebijakan menerima atau mengeluarkan uang. Pembukuan disebut juga pengurusan ketatausahaan. Pembukuan adalah pengurusan keuangan yang menyangkut pengurusan menerima, menyimpan, mengeluarkan uang, tidak menyangkut kewenangan menentukan tetapi hanya melaksanakan. Pembukuan disebut pengurusan bendahara. Jadi, pembukuan adalah semua kegiatan yang menyangkut pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan, atau penyerahan uang yang dilakukan bendahara kepada pihak-pihak yang berwewenang. Bagi unit-unit yang ada di dalam departemen mempertanggungjawabkan pengurusan keuangan itu kepada Badan Pengawas Keuanagan (BPK) melalui departemen masing-masing. Pembukuan masih menggunakan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

1. **Pemeriksaan**

Pemeriksaan (*auditing*) adalah kegiatan meneliti isi pembukuan disertai bukti-bukti pengeluaran yang sah dan wajar. Pemeriksaan bermanfaat bagi bendaraharawan, lembaga yang bersangkutan, atasan, dan BPK. audit dapat dilakukan sebelum (pre-audit), selama pelaksanaan anggaran (on-going audit), dan setelah pelaksanaan (post-audit) untuk mengetahui kepatuhan dalam memenuhi prinsip-prinsip penganggaran.

Manfaat pemeriksaan bagi bendahara antara lain adalah: (1) mengarahkan kerja dengan dasar hukum; (2) menyelesaikan pekerjaan tepat waktu; (3) menghargai kinerja bendaharawan; (4) mengetahui dengan jelas batas kewenangan dan kewajiban; (5) mengendalikan diri dari penyalahgunaan keuangan. Manfaat pemeriksaan bagi lembaga adalah: (1) menciptakan transparansi; (2) menghilangkan kecurigaan; (3) mengetahui tanggung jawab dan kewenangan masing-masing; (4) mengarahkan penggunaan uang.Manfaat pemeriksaan bagi atasan adalah untuk: (1) mengetahui daya serap; (2) hambatan; (3) mengetahui tingkat keberhasilan pengumpulan, penyimpanan dan kelancaran pengeluaran; (4) mengetahui tingkat kecermatan dalam mempertanggungjawabkan keuangan; (5) memprediksi biaya yang akan datang; (6) memiliki arsip dari tahun ke tahun. Manfaat pemeriksaan bagi BPK adalah: (1) ada patokan yang jelas dalam melakukan pengawasan terhadap uang milik negara; (2) ada dasar yang tegas untuk mengambil tindakan apabila terjadi penyelewengan.

Beberapa peraturan keuangan di atas sebetulnya mengharuskan ada audit dari akuntan publik di sekolah sebagai implementasi transparansi dan akuntabilitas kuangan sekolah. Gerakan pemberantasan korupsi dapat diawali oleh kesediaan sekolah untuk diaudit oleh akuntan publik.

1. **Cara Menghitung Biaya**
2. **Cara Penghitungan IKK**

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) kelompok jenis bangunan kabupaten/kota dihitung dengan formula sebagai berikut.



**Keterangan:**

*TKKkj* = tingkat kemahalan harga bangunan kelompok jenis bangunan *j* di

kabupaten/kota *k*

*Hi*  = harga bahan bangunan *i*

*Qij*  = kuantitas/volume bahan bangunan *i* jenis bangunan *j*

* Tipe/jenis spatial
* Cakupan/coverage (kabupaten/kota): …..(jumlah) Kabupeten/kota saat ini
* Paket komoditas dan jasa: 22
* Pengumpulan data harga lengkap seluruh kabupaten/kota
* Penimbang/bobot bahan bangunan bersumber dari hasil survei konstruksi Kimpraswil dengan menggunakan Tabel I/O
* Penimbang/bobot jenis bangunan: Realisasi APBD Kab/Kota Tahun Anggaran 2015
* Metode penghitungan Indeks dapat menggunakan rata-rata geometrik tidak dibobot *(unweighted geometric mean)* serta rata-rata tertimbang *(weighted arithmetic mean).*

1. **Cara Menghitung Standar Pembiayaan Pendidikan**

Standar pembiayaan pendidikan yang baik mempertimbangkan: (1) deskripsi mutu pendidikan yang ingin dicapai; (2) kemampuan manajerial kepala sekolah; (3) variasi fisik dan nonfisik antar kabuapeten/kota. Mutu pendidikan terpenuhi apabila sudah mencapai atau melebihi standar pendidikan yang berlaku. Agar prinsip efektif dan efisien terpenuhi, perlu dilakukan standar biaya sekolah sehingga besaran unit *cost/*siswa/tahun dapat dihitung lebih rinci. Untuk menghitung besarnya kebutuhan biaya operasional dalam pencapaian SPM diperlukan Standar Analisa Biaya (SAB) dengan rumus:



**Keterangan**

*TCa* = biaya keseluruhan (Rp) per sekolah per tahun, pada jenjang tertentu (SD, SMP,

atau SMA) di kabupaten/kota *a*

*fi,j* = frekuensi item ke-*i* dan ke-*j* per tahun

*qi,j* = kuantitas item ke-*i* dan ke-*j* per tahun

*ni,j* = per satuan item ke-*i* dan ke-*j*

*pi,j* = harga item ke-*i* dan ke-*j* (Rp)

*m =* jumlah item biaya pegawai

*n =* jumlah item komponen bukan-pegawai

*ha* = indeks kemahalan pendidikan di kabupaten/kota *a, ha* menyatakan indeks

kemahalan daerah untuk seluruh kabupaten/kota di Indonesia, *ha* = 1 untuk

DKI Jakarta sebagai benchmark. Nilai *ha* diproyeksi dengan IKK diperoleh

dari Depkeu dan BPS, dalam hal ini telah diadaptasikan dengan

memperhitungkan faktor transportasi, dan didapat rentang nilai *ha* yaitu

0,91 ≤ *ha* ≤ 3,7.

Dengan demikian, perhitungan standar biaya operasi meliputi: (1) biaya pegawai (suku pertama ruas kanan persamaan di atas); (2) biaya bukan-pegawai (suku kedua ruas kanan persamaan di atas). Data yang dikumpulkan dari studi lapangan. Biaya satuan/ siswa/tahun/kabupaten/kota dengan rumus sebagai berikut.



**Keterangan**

*UCa* = Biaya satuan (Rp) per siswa per tahun,

pada jenjang tertentu (SD, SMP, atau SMA) di kabupatem/kota *a*

*x*1 = Jumlah siswa per rombel pada jenjang tertentu (SD, SMP, atau SMA)

*x*2 = Jumlah rombel di sekolah.

Contoh menghitung TC dan UC diberikan dalam perkuliahan.

1. **Praktik**

Alokasi pembiayaan pendidikan lebih 75% untuk gaji guru. Alokasi untuk peningkatan layanan siswa relatif masih minim. Pencairan uang serifikasi guru menimbulkan berbagai masalah di lapangan. Uang sertifikasi guru/dosen belum sepenuhnya digunakan untuk meningkatkan profesionalisme. Urutan penganggaran APBN: (1) menyusun RAPBN (Januari-Juli), (2) mengajukan RAPBN (Agustus), (3) menetapkan APBN (September-Oktober), (4) melaksanakan (Januari-Desember berikutnya), (5) mengubah (Oktober), dan (6) mempertanggungjawabkan (November berikutnya).

**S**.**Kasus**

**Kasus 1**

Rendahnya mutu pendidikan tak terlepas dari masalah korupsi. Namun, kasus korupsi di dunia pendidikan tak pernah berhenti. Maraknya korupsi tak terlepas dari sistem birokrasi yang tidak transparan/akuntabel; yang memelihara sistem setoran sekolah ke Dinas. Terlebih pemilihan dan penempatan kepala sekolah ditentukan oleh pejabat setempat tanpa transparansi dan penuh dengan kepentingan politik. Kondisi ini diburuk oleh rendahnya pemahaman kepala sekolah dalam pengelolaan dana pendidikan serta nafsu untuk mempermewah ruang kerja sendiri (Kompas, 18 Agustus 2015: 7). Berikan solusinya!

**Kasus 2**

Program pemerintah yang membebaskan biaya sekolah bagi siswa sekolah negeri mulai SD sampai SMA masih saja dilanggar. Oknum kepala sekolah bersengkongkol dengan komite sekolah memungut uang dengan seribu alasan (Kompas, HI Lumoindong, 2015: 7). Berikan solusinya!

**T. Ringkasan**

Kaitan uang dengan pendidikan ada tiga komponen. Pembiayaanpendidikan adalah jumlah rupiah yang dialokasikan untuk melaksanakan pendidikan. Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu fungsi manajemen pendidikan. Pembiayaan pendidikan mengacu pada peraturan yang berlaku. Jenis biaya: biaya: investasi, operasi, dan personal. Tujuan pembiayaan pendidikan ada tiga. Manfaat pembiayaan pendidikan ada empat. Prinsip pembiayaan pendidikan ada delapan. Pengembangan konsep modal manusia meliputi lima siklus. Perhitungan pembiayaan yang penting yaitu analisis *Cost-Benefit* dan *Cost-Effectiveness.* Perencanaan tenaga kerja mempelajari permintaan tenaga kerja, persediaan tenaga kerja yang dihasilkan dunia pendidikan. Penyebab pengangguran terdidik ada empat. Cara mengatasinya ada tujuh. Biaya pendidikan ada 7 jenis. Metode penganggaran ada enam. Proses anggaran ada lima langkah. Pembukuan adalah pengurusan keuangan yang menyangkut kewenangan dalam menentukan kebijakan menerima atau mengeluarkan uang. Pemeriksaan adalah kegiatan meneliti isi pembukuan. Perhitungan biaya meliputi: IKK, standar pembiayaan, UC, dan TC.

1. **Refleksi**

Pendidikan tidak selamanya diukur dengan uang. Banyak orang menghabiskan uangnya untuk membiayai pendidikan baik bagi dirinya, anaknya maupun kerabatnya. Setelah lulus pendidikan, ada kepuasan pribadi yang dimiliki yang tidak dapat diukur dengan uang.

**DAFTAR PUSTAKA LENGKAP TERDAPAT DALAM BUKU BERJUDUL**

**Manajemen Pendidikan. Pengarang: Husaini Usman. Yogyakarta: Proyek Penulisan Buku/Bahan Ajar Universitas Negeri Yogyakarta (2015)**